

Penguatan *Community-Based Tourism* melalui Peran Strategis BUMDes dalam Pengembangan Desa Wisata.

Rohim^{1*}, Wheny Khristianto², Panca Oktawirani³

¹rohim.annida86@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Community-Based Tourism* (CBT) dalam pengembangan desa wisata melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak utama pemberdayaan masyarakat lokal. penelitian ini dilakukan di Desa Binor, Kabupaten Probolinggo, dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini yaitu: pengelola BUMDes, masyarakat, wisatawan, serta perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan: kesatu, model CBT yang diimplementasikan secara konsisten mampu menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelayanan wisata. Kedua, BUMDes berperan strategis dalam memfasilitasi pelatihan, penguatan kapasitas, serta pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal. Ketiga, Penerapan CBT mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja. Keempat, CBT melalui BUMDes mampu memperkuat identitas budaya serta mendorong pelestarian lingkungan. Temuan ini mempertegas bahwa pariwisata berbasis komunitas merupakan pendekatan efektif dalam mewujudkan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; *Community Based Tourism*; Desa Wisata; Partisipasi Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat.

Pendahuluan

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan lokal di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran pendekatan dalam pengembangan destinasi wisata dari model top-down menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah *Community-Based Tourism* (CBT), yaitu model pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan manfaat dari aktivitas wisata (Oka et al., 2021; Permatasari et al., 2024). Model ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pelestarian budaya dan lingkungan secara berkelanjutan.

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

^{2,3} Usaha Perjalanan Wisata, FISIP, Universitas Jember

CBT mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keunikan lokal, serta menjadi aktor utama dalam membentuk citra destinasi. Hal ini sejalan dengan konsep *partisipasi masyarakat* dalam administrasi publik, seperti yang dijelaskan (Arnstein, 2019) melalui tangga partisipasi yang menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pengelolaan desa wisata, CBT menjadi jembatan antara potensi lokal dan peluang pasar pariwisata yang lebih luas, sambil tetap menjaga kearifan lokal dan daya dukung lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia memberikan ruang kelembagaan bagi desa untuk mengelola potensi ekonomi melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes merupakan entitas ekonomi milik desa yang didirikan untuk mengelola usaha dan aset desa secara kolektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pariwisata, BUMDes memiliki potensi besar sebagai institusi lokal yang mampu mengelola dan mengembangkan unit usaha wisata secara profesional, berbasis pada nilai-nilai partisipatif dan keberlanjutan.

Peran strategis BUMDes dalam pengembangan desa wisata berlandaskan pada kemampuannya untuk menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat, penghubung antara pemerintah dan warga, serta pengelola aset lokal yang mendukung aktivitas wisata. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketika BUMDes terlibat dalam pengelolaan pariwisata, dampaknya mencakup peningkatan pendapatan desa, penciptaan lapangan kerja baru, dan penguatan identitas budaya lokal (Muttaqin, 2023; Rohim et al., 2022; Widodo et al., 2023). Namun demikian, keberhasilan pengelolaan CBT melalui BUMDes sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan multipihak.

Dalam implementasinya, pendekatan CBT yang difasilitasi oleh BUMDes membutuhkan sinergi antara aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Pilar sosial mencakup keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan wisata, pelestarian budaya, serta kontrol atas arah pembangunan destinasi. Pilar ekonomi mencakup kemampuan BUMDes dalam menciptakan nilai tambah dari potensi wisata lokal, sementara pilar kelembagaan berfokus pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Konsep *good governance* dalam administrasi publik juga menjadi kerangka penting dalam mewujudkan pengelolaan desa wisata yang efektif dan partisipatif (Osborne, 2006; Pangestu et al., 2025).

Di banyak desa wisata, keterlibatan BUMDes dalam CBT telah menunjukkan hasil positif. Contoh seperti di Desa Binor, Kabupaten Probolinggo, memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh kemampuan BUMDes dalam mengelola potensi lokal serta menggerakkan masyarakat secara aktif (Rohim, Asmuni, & Muttaqin, 2021). Melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan unit usaha wisata, BUMDes tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga katalisator transformasi sosial di tingkat desa.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara mendalam bagaimana penguatan Community-Based Tourism melalui peran strategis BUMDes dapat mendorong pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan inklusif. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis terhadap pengelolaan kelembagaan pariwisata desa serta model tata kelola kolaboratif berbasis komunitas.

Tinjauan Pustaka

A. Strategi Pengembangan (Development Strategy)

Strategi pengembangan adalah proses sistematis dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui analisis peluang pasar dan diversifikasi produk atau layanan (Ansoff, 1965). Pendekatan ini melibatkan pemilihan arah strategis seperti penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, atau diversifikasi. Hal tersebut diperkuat oleh (Porter & Advantage, 1985) mengenai keunggulan kompetitif, menekankan bahwa strategi pengembangan memerlukan pemahaman mendalam tentang kekuatan kompetitif yang membentuk industri. Porter mengidentifikasi tiga strategi generik utama: kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus, yang dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam konteks pengembangan.

Strategi pengembangan pariwisata merupakan pendekatan sistematis dalam mengelola potensi wisata suatu wilayah agar menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan wisata tidak hanya dinikmati oleh wisatawan, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Strategi pengembangan juga mengacu pada teori (Price et al., 1980) yang menyatakan bahwa destinasi wisata mengalami fase eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, dan penurunan atau pembaharuan. Oleh karena itu, strategi harus mampu menjaga vitalitas destinasi agar tidak mencapai titik jenuh.

Dalam konteks desa wisata, strategi pengembangan harus menekankan pada potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup identifikasi atraksi lokal, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan, serta distribusi manfaat yang adil. Strategi semacam ini dikenal sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal merupakan bagian penting dari strategi. Masyarakat yang terampil dalam pelayanan wisata, manajemen usaha, dan promosi digital akan lebih siap mengambil peran dalam pengembangan pariwisata.

Strategi yang berhasil juga membutuhkan kelembagaan lokal yang kuat. BUMDes sebagai entitas ekonomi desa dapat dijadikan motor penggerak utama dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Akhirnya, strategi pengembangan pariwisata yang ideal adalah strategi yang mampu memberdayakan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan menciptakan nilai tambah ekonomi secara inklusif. Strategi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan pelestarian jangka panjang.

B. Model Pengelolaan Desa Wisata

Model pengelolaan desa wisata merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola desa sebagai destinasi wisata dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, memelihara budaya dan lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks administrasi publik, pengelolaan desa wisata melibatkan berbagai stakeholder, seperti pemerintah,

masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi, yang bekerja sama untuk merancang kebijakan, strategi, dan program yang mendukung keberlanjutan pariwisata desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model CBT (Community-Based Tourism).

Community-Based Tourism (CBT) adalah model pengelolaan pariwisata yang mengutamakan peran serta masyarakat lokal dalam setiap aspek pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Dalam model ini, masyarakat berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pariwisata yang ada di desa. Tujuannya adalah agar manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, serta untuk melestarikan budaya lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.

Teori yang relevan dalam administrasi publik terkait dengan model CBT adalah Teori Partisipasi Masyarakat (Arnstein, 1969), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, termasuk pengelolaan destinasi wisata. Melalui teori ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan pariwisata dan memastikan bahwa keberlanjutan sosial dan ekonomi dapat tercapai. Community-Based Tourism (CBT) merupakan model pengembangan pariwisata yang berfokus pada peran aktif masyarakat lokal sebagai pengelola, pelaku, dan penerima manfaat utama dari kegiatan wisata. Model ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata tetap berada di komunitas lokal dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan.

CBT muncul sebagai respons terhadap praktik pariwisata massal yang seringkali merugikan masyarakat lokal, baik secara sosial, budaya, maupun lingkungan. Dalam CBT, masyarakat tidak hanya menjadi objek wisata tetapi juga menjadi subjek utama dalam seluruh proses pengembangan.

Prinsip utama CBT adalah partisipasi masyarakat dalam semua tahapan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kegiatan pariwisata. Menurut Asker et al. (2010), keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang kuat serta meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan proyek wisata. CBT menekankan pada pelestarian budaya dan lingkungan. Kegiatan wisata dirancang agar tetap menjaga nilai-nilai lokal dan tidak merusak sumber daya alam. Oleh karena itu, CBT dianggap sebagai bentuk nyata dari pariwisata berkelanjutan.

Keunikan dari CBT adalah pendekatannya yang berbasis komunitas dan nilai-nilai lokal. Model ini menolak eksploitasi sumber daya secara besar-besaran dan lebih mengedepankan pendekatan kecil, bertahap, dan berbasis potensi endogen desa. Pelibatan komunitas dalam CBT dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), koperasi wisata, atau unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Kelembagaan lokal ini menjadi tulang punggung dalam mengatur kegiatan wisata secara demokratis dan transparan.

CBT juga mengedepankan prinsip pemberdayaan. Artinya, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi tetapi juga diberi pelatihan, pendidikan, dan ruang untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam mengelola usaha wisata. Partisipasi perempuan, pemuda, dan kelompok marginal sangat ditekankan dalam CBT (Asker et al., 2010). Inklusivitas menjadi kunci utama agar seluruh elemen masyarakat mendapatkan akses dan kesempatan yang adil dalam kegiatan pariwisata.

Model CBT juga mengutamakan distribusi manfaat yang adil. Keuntungan dari usaha wisata biasanya digunakan untuk mendanai program sosial, pembangunan infrastruktur, atau kegiatan budaya yang mendukung keberlanjutan komunitas. Dalam praktiknya, CBT mendorong pengembangan produk wisata yang unik dan otentik, seperti atraksi budaya, kuliner tradisional, kegiatan pertanian, dan wisata alam. Produk ini dirancang berbasis pada kekuatan lokal yang tidak dapat ditiru oleh destinasi wisata besar.

Pengelolaan CBT membutuhkan transparansi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, lembaga pengelola wisata seperti BUMDes atau Pokdarwis harus memiliki sistem akuntansi, pelaporan, dan mekanisme evaluasi yang melibatkan warga secara berkala. Akhirnya, model CBT bukan hanya sekadar pendekatan pariwisata, tetapi juga merupakan strategi pembangunan desa yang inklusif, demokratis, dan berbasis potensi lokal. Model ini menawarkan masa depan pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan ketika dijalankan dengan nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat.

C. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam pembangunan yang menempatkan warga sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek dari kebijakan dan program pembangunan. Dalam konteks pengembangan desa wisata berbasis Community-Based Tourism (CBT), partisipasi masyarakat bukan hanya penting, melainkan menjadi elemen inti keberhasilan. Teori partisipasi yang banyak dirujuk adalah dari (Arnstein, 2019) yang dikenal dengan *Ladder of Citizen Participation*. Arnstein membagi partisipasi menjadi delapan tingkat, mulai dari tingkat manipulasi (non-partisipasi) hingga kontrol warga (*citizen control*). Dalam konteks CBT, tingkat partisipasi yang ideal berada pada level kolaborasi atau kemitraan, di mana masyarakat memiliki wewenang dalam proses pengambilan keputusan.

Relevansi teori partisipasi dengan penelitian ini sangat kuat, mengingat bahwa CBT hanya akan efektif jika masyarakat dilibatkan secara penuh dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan desa wisata. Peran aktif warga dalam operasional homestay, pemandu wisata, produksi kerajinan, dan penyelenggaraan atraksi budaya menjadi bukti nyata dari praktik partisipatif. Partisipasi yang tinggi juga meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program wisata. Hal ini penting agar masyarakat tidak merasa wisata hanya untuk kepentingan luar, tetapi menjadi bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan bersama. Teori ini sejalan dengan pendekatan pembangunan partisipatif (*participatory development*) yang dikembangkan Chambers (1997), yang menekankan bahwa pembangunan harus berdasarkan kebutuhan dan inisiatif lokal.

Dalam teori penguatan kapasitas masyarakat, partisipasi dianggap sebagai medium untuk belajar bersama dan membangun kompetensi sosial-ekonomi warga. Melalui pelibatan langsung, masyarakat memperoleh keterampilan manajerial, teknis, dan interpersonal yang dapat digunakan dalam berbagai konteks kehidupan, tidak hanya pariwisata. Teori ini juga relevan dalam menjelaskan bagaimana partisipasi mampu memperkuat kohesi sosial. Ketika warga terlibat dalam forum musyawarah, gotong royong, dan kolaborasi kegiatan wisata, interaksi sosial menjadi lebih intens dan

mempererat solidaritas komunitas. (Putnam, 2001) menyebut hal ini sebagai bentuk penguatan *social capital*.

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat tercermin dalam peran aktif dalam BUMDes, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan kelompok usaha desa. Mereka tidak hanya menjalankan kegiatan wisata, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan strategis melalui mekanisme musyawarah desa dan pengawasan kegiatan BUMDes (Rohim, et.al, 2021). Lebih jauh lagi, teori partisipasi memberikan dasar konseptual untuk memahami peran masyarakat dalam tata kelola yang demokratis dan inklusif. Ketika masyarakat diberikan ruang, informasi, dan wewenang, maka keberlanjutan program wisata akan lebih terjamin. Ini menghindari dominasi elite desa atau pihak luar yang dapat memicu konflik kepentingan.

Dengan demikian, teori partisipasi masyarakat sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis bagaimana BUMDes dapat menjadi fasilitator utama dalam mengembangkan CBT. Peran BUMDes yang partisipatif, akuntabel, dan terbuka terhadap ide-ide warga akan memperkuat kapasitas komunitas dan menciptakan desa wisata yang berdaya saing tinggi.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Penelitian kualitatif dianggap relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks, pengalaman, dan dinamika sosial yang berkembang secara alamiah di tingkat desa, yang tidak dapat direpresentasikan hanya melalui angka-angka statistik.

Tujuan dari penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara rinci realitas yang terjadi di lapangan dalam bentuk narasi, bukan angka. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai bagaimana strategi penguatan *community-based tourism* dijalankan melalui peran aktif BUMDes. Sejalan dengan pandangan (Moleong, 2014), data yang dikumpulkan menjadi kunci untuk memahami fenomena yang diteliti, sehingga fokus utama diarahkan pada makna, pengalaman, dan persepsi para aktor lokal yang terlibat secara langsung dalam pengembangan desa wisata.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, di antaranya wawancara mendalam dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti pengelola BUMDes, perangkat desa, wisatawan, serta masyarakat lokal. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan dan pengalaman subjektif yang beragam dari setiap aktor. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan di lokasi objek wisata untuk mengamati secara langsung kondisi fisik, aktivitas wisata, serta interaksi antara pengelola dan masyarakat. Dokumentasi seperti laporan kegiatan, foto, dan data pendukung lainnya turut digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan memperkaya analisis.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *community-based tourism* melalui peran BUMDes. Tahapan analisis mengikuti kerangka dari (Miles & Huberman, 2014), yakni dimulai dengan proses kondensasi data untuk menyaring informasi penting, dilanjutkan dengan penyusunan deskripsi secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan tahapan eksplanasi untuk menjelaskan hubungan antar temuan. Akhirnya, dilakukan proses interpretasi untuk memberikan makna terhadap data yang diperoleh, sehingga menghasilkan pemahaman holistik tentang dinamika penguatan desa wisata yang berbasis komunitas melalui BUMDes di Desa Binor.

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini hasil dan pembahasan dari penelitian pengembangan desa wisata menggunakan menggunakan model CBT (*Community-Based Tourism*).

1. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan CBT sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengelolaan wisata. Di Desa Binor, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses pengembangan pariwisata, melainkan aktor utama yang memegang kendali atas arah pengembangan destinasi mereka. Mereka terlibat dalam penyediaan homestay, penyajian kuliner lokal, pertunjukan budaya, dan pengelolaan atraksi wisata berbasis lingkungan.

Partisipasi masyarakat di Desa Binor berlangsung secara terstruktur dan terfasilitasi oleh BUMDes. Setiap keputusan penting dalam pengelolaan wisata diambil melalui musyawarah desa, di mana perwakilan kelompok masyarakat seperti perempuan, pemuda, dan pelaku usaha kecil dilibatkan secara aktif. Hal ini memperkuat posisi masyarakat dalam tata kelola wisata dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap sumber daya lokal.

Pelibatan masyarakat tidak hanya berhenti pada level operasional, tetapi juga mencakup proses perencanaan dan evaluasi. Masyarakat diajak untuk melakukan pemetaan potensi wisata dan identifikasi permasalahan, serta dilibatkan dalam evaluasi kegiatan wisata yang telah berjalan. Kegiatan ini membangun budaya reflektif dan pembelajaran bersama dalam komunitas desa wisata. Selain itu, pemberdayaan ekonomi lokal menjadi bagian integral dari partisipasi masyarakat. Beberapa ibu rumah tangga membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) untuk memproduksi kerajinan tangan dan makanan khas yang dijual kepada wisatawan. Aktivitas ini meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh BUMDes turut memperkuat kapasitas masyarakat. Pelatihan pemandu wisata, pemasaran digital, dan kebersihan lingkungan diberikan secara berkala agar standar pelayanan wisata tetap terjaga. Praktik ini sejalan dengan hasil studi (Ikhwanto, 2022) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan kunci keberlanjutan CBT. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya dan lingkungan juga menunjukkan dampak positif. Kegiatan ritual budaya seperti petik laut, kesenian tradisional, dan upacara adat tetap dilestarikan sebagai bagian dari atraksi wisata. Selain memperkuat identitas lokal, hal ini juga menjadi sarana pendidikan budaya bagi generasi muda dan wisatawan.

Temuan ini juga memperkuat pandangan (Arnstein, 2019) tentang pentingnya partisipasi bermakna, di mana masyarakat tidak hanya diberi ruang, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Di Desa Binor, partisipasi masyarakat telah mencapai level "partnership", di mana masyarakat dan institusi desa bekerja secara sejajar. Keberhasilan pelibatan masyarakat di Desa Binor juga tidak terlepas dari dukungan regulasi dan kepemimpinan lokal yang visioner. Kepala desa dan pengurus BUMDes memiliki komitmen untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dukungan ini memperkuat legitimasi program CBT dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap institusi desa.

Dalam konteks penelitian terdahulu, temuan ini menguatkan studi oleh (Muttaqin, 2023; Maulidiah & Megawati, 2022) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi berdampak positif terhadap keberhasilan pengelolaan desa wisata. Hal ini menunjukkan pentingnya menciptakan ekosistem sosial yang mendukung partisipasi aktif dan setara.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat yang kuat di Desa Binor tidak hanya meningkatkan keberhasilan program wisata, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, memperluas peluang ekonomi, dan mendorong keberlanjutan jangka panjang. CBT tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga menjadi medium transformasi sosial yang mengangkat potensi desa dari dalam.

2. Peran Strategis BUMDes sebagai Fasilitator

BUMDes berperan sebagai penggerak utama dalam mengorganisasi dan memfasilitasi pengembangan CBT di Desa Binor. Lembaga ini mengelola unit usaha wisata, menginisiasi pelatihan masyarakat, serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor publik dan swasta. Dengan kemampuan manajerial dan legitimasi kelembagaan, BUMDes menjadi tulang punggung tata kelola wisata desa.

Dalam konteks pelatihan, BUMDes menyelenggarakan program peningkatan kapasitas seperti pelatihan hospitality, manajemen homestay, pemasaran digital, dan pemanduan wisata. Langkah ini memperkuat daya saing masyarakat agar mampu memenuhi standar industri pariwisata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Dwinarko et al., 2020), yang menyatakan bahwa pelatihan dari BUMDes berdampak signifikan terhadap kesiapan masyarakat dalam mengelola usaha pariwisata.

BUMDes juga menjadi aktor penghubung antar-stakeholder dalam pengembangan desa wisata berbasis kolaborasi. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas pegiat wisata memperkuat jejaring dan sumber daya desa. Pendekatan ini sejalan dengan model Quadruple Helix yang dikemukakan oleh Carayannis dan Campbell (2009), yaitu sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas. Penelitian oleh (Rohim, 2021) juga menunjukkan bahwa peran BUMDes sebagai fasilitator kolaboratif mampu menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan adaptif dalam pengembangan pariwisata desa.

3. Penerapan CBT mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja

Implementasi CBT di Desa Binor memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Aktivitas wisata yang dikelola bersama oleh BUMDes dan masyarakat telah menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang dinamis

dan inklusif. Kegiatan wisata seperti penyediaan homestay, warung makan tradisional, jasa pemandu lokal, hingga penyewaan kendaraan dikelola secara langsung oleh warga desa. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran wisatawan yang datang ke Desa Binor memicu perputaran ekonomi yang positif. Wisatawan tidak hanya menikmati objek wisata, tetapi juga mengonsumsi produk dan jasa lokal seperti kerajinan tangan, makanan khas desa, serta layanan transportasi dan penginapan. Transaksi ini memperkuat ekonomi lokal karena uang yang dibelanjakan wisatawan lebih banyak beredar di lingkungan masyarakat setempat. Hal ini menjadi pembeda utama CBT dibanding model pariwisata konvensional yang cenderung memusatkan keuntungan pada pihak eksternal.

Menurut pengelola BUMDes, peningkatan pendapatan masyarakat tercermin dari adanya lonjakan jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam sektor pariwisata. Dalam kurun waktu dua tahun, jumlah UMKM meningkat hampir dua kali lipat dan sebagian besar dikelola oleh keluarga lokal. Dampak ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga memperluas peluang kerja di desa. Peluang kerja yang diciptakan melalui CBT menjadi solusi atas keterbatasan lapangan pekerjaan di desa. Banyak pemuda yang sebelumnya memilih merantau kini memilih untuk bekerja di sektor pariwisata, baik sebagai pemandu, operator homestay, ataupun pelaku usaha kuliner. Perubahan ini menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan muda desa dan membantu menekan laju urbanisasi.

Sebagai tambahan, BUMDes juga membuka peluang kerja melalui pelatihan dan rekrutmen warga lokal untuk kebutuhan operasional wisata. Kegiatan seperti pelatihan bahasa Inggris, hospitality, dan digital marketing dilakukan secara rutin guna meningkatkan daya saing SDM lokal. Peningkatan kapasitas ini membuat masyarakat lebih percaya diri dan siap bersaing dalam industri wisata.

Selain aspek ekonomi mikro, CBT juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes sebagai badan usaha milik desa menyalurkan sebagian keuntungan usaha ke kas desa, yang kemudian digunakan untuk mendanai program-program pembangunan seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, dan kegiatan sosial. Dampak ini menunjukkan bahwa CBT tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga komunitas secara kolektif.

Kehadiran wisata berbasis komunitas memperluas jejaring ekonomi desa dengan mitra luar seperti agen perjalanan, investor lokal, dan pemerintah daerah. Hubungan ini mendorong pertumbuhan investasi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Dengan kata lain, CBT menjadi jembatan antara potensi desa dengan pasar yang lebih luas tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal.

Dari sisi perempuan, program CBT juga memberikan ruang partisipasi yang lebih besar. Banyak ibu rumah tangga yang kini terlibat dalam usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga pengelolaan kebersihan dan pelayanan wisata. Dampak ini mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan memperkuat posisi mereka dalam struktur ekonomi rumah tangga.

Efek domino dari peningkatan pendapatan dan lapangan kerja ini turut mendorong perubahan gaya hidup masyarakat. Banyak warga yang mulai menata rumah sebagai homestay, memperbaiki sanitasi, dan mempelajari keterampilan baru yang relevan dengan dunia wisata. Hal ini menandakan terjadinya transformasi sosial sebagai konsekuensi dari keberhasilan implementasi CBT. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di desa.

Pendapatan tambahan dari aktivitas pariwisata digunakan untuk pendidikan anak, perbaikan tempat tinggal, dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Dengan demikian, CBT menjadi instrumen pengentasan kemiskinan berbasis lokal.

Pemerintah desa menyambut baik dampak positif ini dengan memberikan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Kebijakan seperti pengelolaan retribusi wisata, pemeliharaan fasilitas umum, dan pengawasan mutu pelayanan dikembangkan secara partisipatif. Hal ini memastikan bahwa keberhasilan ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Penting dicatat bahwa dampak ekonomi dari CBT tidak terjadi secara instan. Proses pembangunan kapasitas, perubahan pola pikir, dan adaptasi terhadap sektor pariwisata memerlukan waktu dan pendampingan yang konsisten. Oleh karena itu, kolaborasi antara BUMDes, masyarakat, pemerintah, dan mitra eksternal menjadi syarat mutlak dalam menciptakan hasil jangka panjang.

Hasil temuan ini memperkuat studi (Kurniasih & Setyoko, 2019; Smyth, 2001; Asmuni et al., 2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan ekonomi desa wisata sangat ditentukan oleh tata kelola usaha desa yang transparan dan partisipatif. Di Desa Binor, BUMDes membuktikan kapasitasnya sebagai pengelola ekonomi yang mampu mengintegrasikan nilai bisnis dengan prinsip pemberdayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CBT bukan hanya menjadi alat untuk menarik wisatawan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berorientasi pada keadilan sosial. Peningkatan pendapatan dan pembukaan lapangan kerja yang merata membuktikan bahwa ketika masyarakat diberi ruang dan dukungan, mereka mampu menjadi aktor utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

4. CBT melalui BUMDes mampu memperkuat identitas budaya serta mendorong pelestarian lingkungan

CBT di Desa Binor tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam penguatan identitas budaya lokal. Kegiatan wisata dirancang untuk menampilkan nilai-nilai dan tradisi budaya yang sudah ada sejak lama. Melalui pertunjukan seni tradisional seperti tari remo, musik hadrah, dan wayang orang, masyarakat tidak hanya mempertahankan budaya leluhur tetapi juga memperkenalkannya kepada wisatawan.

BUMDes sebagai fasilitator utama mengorganisasi kegiatan budaya tahunan seperti petik laut, festival desa, dan upacara sedekah bumi untuk dijadikan atraksi wisata. Kegiatan tersebut disusun dengan melibatkan tokoh adat, pemuda, dan ibu-ibu pengrajin agar pelestarian budaya menjadi bagian dari keseharian komunitas. Hal ini menciptakan sinergi antara tradisi dan ekonomi berbasis wisata.

Generasi muda juga mulai terlibat aktif dalam pelestarian budaya berkat insentif ekonomi dan pelatihan yang difasilitasi BUMDes. Mereka menjadi penampil tari, pengrajin souvenir, hingga pemandu wisata budaya yang mampu menjelaskan sejarah lokal kepada pengunjung. Ini menunjukkan bahwa CBT mendorong regenerasi pelestari budaya secara berkelanjutan.

Dalam konteks pelestarian bahasa dan narasi lokal, CBT membuka ruang ekspresi yang luas. Pemandu lokal menggunakan bahasa daerah dalam menyambut wisatawan, sementara narasi sejarah desa disampaikan dalam bentuk cerita rakyat yang diajarkan turun temurun. Identitas kolektif ini menjadi daya tarik unik bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik.

Kegiatan pembuatan kerajinan tangan seperti batik lokal, anyaman bambu, dan pernak-pernik berbasis ikon desa turut dilestarikan dalam program CBT. Produk-produk ini dijual di galeri desa yang dikelola oleh BUMDes dan menjadi bagian dari cinderamata wisata. Kreativitas ini juga mendorong inovasi dalam pelestarian budaya berbasis ekonomi. Di sisi lain, pelestarian lingkungan menjadi bagian integral dari program CBT yang diterapkan di Desa Binor. BUMDes bekerja sama dengan masyarakat untuk meluncurkan program desa bersih dan hijau. Kegiatan rutin seperti gotong royong membersihkan pantai dan jalur wisata dilakukan setiap pekan dengan partisipasi warga lintas usia.

Program penghijauan juga dilaksanakan melalui penanaman pohon cemara laut dan mangrove di sekitar kawasan wisata pantai. Program ini tidak hanya memperkuat daya tarik visual destinasi, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan ekosistem pesisir. Wisatawan bahkan diajak ikut serta dalam kegiatan tanam pohon sebagai bagian dari paket wisata edukatif. Untuk mengurangi sampah plastik, BUMDes menginisiasi program "Desa Bebas Plastik" dengan menggandeng koperasi lokal. Warga dan pelaku usaha diwajibkan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Sebagai bentuk apresiasi, warga yang konsisten menerapkan prinsip hijau diberi penghargaan tahunan oleh pemerintah desa.

CBT juga mengembangkan jalur edukasi lingkungan seperti ekowisata mangrove dan jalur tracking alam. Di sepanjang jalur tersebut, papan informasi berisi edukasi tentang jenis flora-fauna lokal dipasang untuk mendukung kesadaran lingkungan wisatawan. Aktivitas ini diharapkan membentuk wisatawan yang bertanggung jawab. Pendidikan lingkungan diberikan kepada anak-anak desa melalui ekstrakurikuler sekolah dan kegiatan karang taruna. Anak-anak diajak untuk mengenali tanaman lokal, fungsi ekosistem, serta cara menjaga kebersihan lingkungan. Program ini membangun budaya sadar lingkungan sejak dini.

Peran tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan program lingkungan. Para pemuka adat, guru, dan tokoh agama menyebarkan pesan-pesan pelestarian dalam khotbah dan pertemuan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan konservasi sebagai nilai moral dan spiritual yang dijaga bersama. CBT menjadikan nilai-nilai adat seperti gotong royong, kebersamaan, dan keselarasan dengan alam sebagai prinsip utama. Hal ini membedakan CBT dari pariwisata konvensional yang seringkali mengabaikan dimensi sosial dan ekologis dari pembangunan wisata. Model ini memberikan ruang bagi komunitas untuk berkembang tanpa kehilangan akar budayanya.

Dengan demikian, CBT menjadi sarana strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan. Program-program tersebut memperkuat identitas lokal, memperluas pengetahuan masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Desa Binor menunjukkan bahwa pelestarian dan pengembangan dapat berjalan beriringan ketika masyarakat menjadi aktor utamanya.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Community-Based Tourism yang difasilitasi oleh BUMDes memiliki kontribusi besar dalam pengembangan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan. BUMDes bukan hanya sebagai unit bisnis, tetapi juga sebagai institusi pemberdayaan yang mampu membangun kolaborasi, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta menjaga nilai-nilai lokal. Model penguatan CBT melalui peran strategis BUMDes dapat direplikasi di desa-desa lain dengan dukungan kelembagaan yang memadai dan pendekatan kolaboratif.

Daftar Pustaka

Sumber dari publikasi jurnal:

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Arnstein, S. R. (2019). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 24–34.
- Asmuni, Rohim, & Trihartono, A. (2020). Minimizing brain drain: How BumDes holds the best resources in the villages. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012011>
- Dwinarko, D., Sjafrizal, T., Dewi, N. K., Sulistyanto, A., & Widodo, A. (2020). Pelatihan Manajemen Komunikasi Bisnis Dan Budaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Ponggang Serangpanjang Subang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 3(1), 73–84.
- Ikhwanto, D. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata Tlogoweru Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Nawasena: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 1(1), 41–55.
- Kurniasih, D., & Setyoko, P. I. (2019). Public governance capacity in the accountability of village-owned enterprise management in Indonesia. In *Journal Sampurasun: Interdisciplinary journal.unpas.ac.id*. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/sampurasun/article/view/1745>
- Muttaqin, M. Z. (2023). Entertaining Development from Downstream: Village-Owned Enterprises, Women's Empowerment, and Information Technology in Binor Probolinggo Village and Pujon Kidul Village, Indonesia. In *Empowering Women in the Digital Economy: A Quest for Meaningful Connectivity and Access in Developing Countries* (pp. 71–89). <https://doi.org/10.4324/9781003302346-4>
- Oka, I., Murni, N. G. N. S., & Mecha, I. (2021). The community-based tourism at the tourist village in the local people's perspective. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 38(4), 988–996.
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? In *Public Management Review* (Vol. 8, Issue 3, pp. 377–387). <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Pangestu, E. R., Herawati, N. R., & Marlina, N. (2025). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Untuk Mewujudkan Community Based Tourism (CBT) (Studi Penelitian Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 642–662.

- Price, M. L., Hagerman, A. E., & Butler, L. G. (1980). Tannin content of cowpeas, chickpeas, pigeon peas, and mung beans. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 28(2), 459–461.
- Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and consequences. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 41–51.
- Rohim, R., Asmuni, A., & Muttaqin, M. Z. (2021). Multi-sector Collaboration; Success Stories of Tourism Village Development. *Jurnal Ilmiah Ilmi Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*.
- Rohim, R., Asmuni, Sunarsiyani, F. E., Makmun, S., Muttaqin, M. Z., Suryanti, M. S. D., & Evendi, A. (2022). Common Thread: The Management of Village-Owned Enterprises and Women's Empowerment. *Sustainability and Climate Change*, 15(3), 166–169. <https://doi.org/10.1089/scc.2022.0007>
- Smyth, R. (2001). Efficiency, performance and changing corporate governance in China's township-village enterprises since the 1990s. *Asian-Pacific Economic Literature*, 15(1), 30–41. <https://doi.org/10.1111/1467-8411.00093>
- Widodo, S., Saptawan, A., Purnama, D. H., Ismail, R. G., & Priyanto, L. (2023). Pendampingan Manajemen Strategis Pada Perangkat Desa dan Pengelola BUMDes Desa Tanjung Dayang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 1635–1644.

Sumber dari buku:

- Ansoff, H. I. (1965). Corporate Strategy. New York, McGraw-Hill. *Ansoff, HI (1965b) Strategic Management*, (2), 471–517.
- Asker, S. A., Boronyak, L. J., Carrard, N. R., & Paddon, M. (2010). *Effective community based tourism: A best practice manual*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 391–406.
- Miles, M. B., & Huberman, A. (2014). M., & Saldana, J.(2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Permatasari, P., Winarno, J., & Wibowo, A. (2024). The role of stakeholder in community based tourism (cbt)-based tourist village in Gentungan Village, Gondangrejo Sub District, Karanganyar Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1302(1), 12133.
- Porter, M. E., & Advantage, C. (1985). *Creating and sustaining superior performance*. The Free Press.
- Rohim, R., Asmuni, A., & Supriyadi, I. (2021). Social Entrepreneurship: Village Owned Enterprises Development Strategy. *Proceeding International Conference On Economics, Business And Information Technology (ICEBIT)*, 3, 100–105.